

Keynote Speech MSF I

Perkembangan Pelaksanaan Open Government Indonesia

Dra. Jaleswari Pramodhawardhani, M.Hum.

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum,
Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia

Kamis, 24 Februari 2022



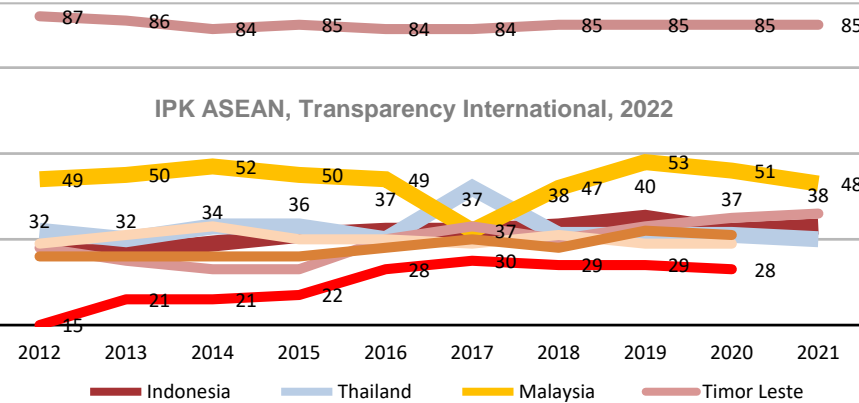
“Momentum pandemi ini adalah saat yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif membangun tata kelola pemerintahan, yang cepat dan akuntabel.

**Keduanya adalah aspek yang tidak bisa dipertukarkan, dan harus dilakukan dengan dua strategi utama yaitu
1) perluasan partisipasi publik yang inklusif
serta 2) transformasi digital pemerintah.”**

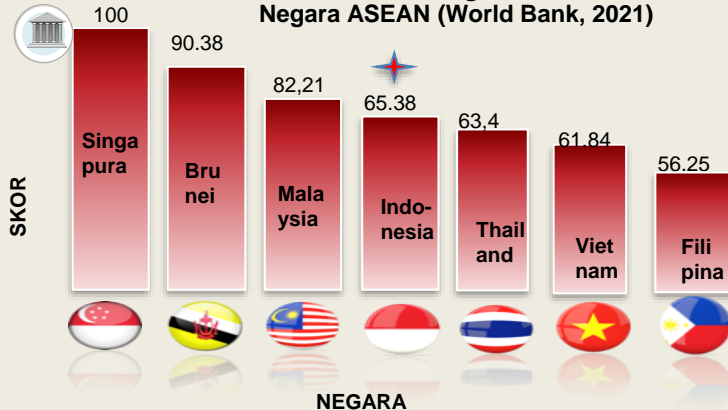
Sambutan Presiden
OGP Global Summit 2021

INDIKATOR KINERJA MAKRO

IPK ASEAN, Transparency International, 2022



Tabel Skor dan Ranking Govt. Effectiveness Negara ASEAN (World Bank, 2021)



Tantangan Puncak Kepuasan Publik

Memasuki paruh tengah periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, apresiasi layak dilayangkan. Pasalnya, pada babak krusial ini, kinerja Jokowi-Amin bersama kabinatnya memuaskan bagian terbesar publik.

Bestian Nainggolan

JAKARTA, KOMPAS — Menurut hasil survei Litbang Kompas, saat ini surplus kepuasan publik mendominasi sebagian kinerja pemerintahan. Secara keseluruhan, hampir tiga perempat bagian publik (73,9 persen) menyatakan rasa puas. Sebaliknya, hanya 26,9 persen yang masih menyatakan ketidakpuasan.

Menariknya, tingginya ekspresi kepuasan publik dinyatakan pada setiap bidang. Pada bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan upaya peningkatan rakyat dari kemiskinan, mencatatkan kepuasan tertinggi, yakni 76,4 persen masyarakat menyatakan puas.

Menyusul selanjutnya, dari sisi kinerja politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga selama

(Berlanjut ke hlm 15 kol 4-7)

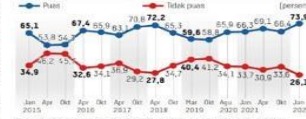
BACA JUGA:
Bursa Calon Presiden 2024
Ada banyak nama yang beredar dalam bursa calon presiden di 2024.
KOMPAS.ID
klik.kompas.id/pangunggalgarkris

Survei Kepemimpinan Nasional

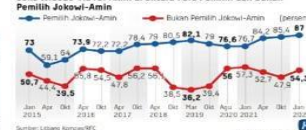
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial, Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum, dan Perekonomian

Kepuasan Total 73,9%

Tingkat Kepuasan dan Ketidakpuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin



Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin di antara Para Pemilih dan Bukan Pemilih Jokowi-Amin



Sumber: Litbang Kompas/RC

SURVEI KEPEMIMPINAN NASIONAL

Dukungan Rakyat Modal Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Tingginya tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Presiden Jokowi, Pertama, langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi pandemi dan dampak-dampaknya. Kedua, Presiden konsisten memajukan visi dan misinya, antara lain pemerataan pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pandemi diakui sebagai pukulan berat, tetapi langkah yang keluar dari krisis sekaligus digunakan sebagai lompatan agar visi-misi Indonesia mulai bisa terwujud.

"Presiden dan Wapres ingin memanfaatkan waktu tersisa hingga Oktober 2024 untuk tidak berhenti bekerja mengantar bangsa ini agar lepas landas," katanya.

Tingginya tingkat kepuasan publik kepada pemerintah itu,

antara lain, disumbangkan sektor politik, keamanan, dan penegakan hukum. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Jumat (8/2), juga berjanji menjadi modal kepuasan publik sebagai modal sosial-politik pemerintah, salah satunya pembangunan demokrasi ke depan.

Menurut Mahfud, tingkat kepuasan publik pada sektor politik dan keamanan yang meningkat disebabkan berbagai kebijakan pemerintah dalam merawat dinamika masyarakat sebagai bagian dari negara demokratis. Adapun di sisi penegakan hukum karena

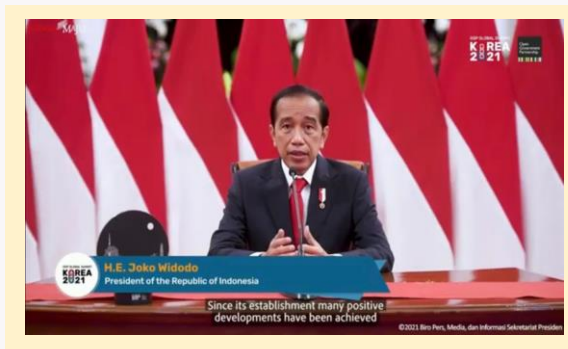
(Berlanjut ke hlm 15 kol 6-7)

BACA JUGA: HLN 2 DAN E-PAPER A

Indikator makro di bidang tata kelola pemerintah, diantaranya; Indeks Efektivitas Pemerintah yang dikeluarkan oleh World Bank, Indeks Demokrasi yang dikeluarkan oleh Economic Intelligence Unit, Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International, yang skornya mulai kembali naik setelah sebelumnya sempat berkontraksi di tahun 2020.

1. Perkembangan Implementasi OGI

Peran Indonesia dalam OGP Global Summit 2021



Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam *Opening Plenary* tanggal 15 Desember 2021 bersama dengan 13 kepala negara lainnya. Beliau menekankan 2 hal penting, yaitu:

1. Peningkatan Partisipasi Publik
2. Penguatan Inovasi Digital yang Inklusif



Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa menyampaikan catatan terkait “Masa Depan Tata Kelola di Asia dan Pasifik”, pada hari Kamis 16 Desember 2021 dalam agenda *Asia Pacific Roundtable*. Beliau menggarisbawahi pentingnya:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Penyelarasan Isu Keterbukaan Pemerintah pada Forum Global



Indonesia menorehkan beberapa prestasi dan penghargaan, di antaranya:



LKPP bersama dengan ICW memperoleh Juara 2 OGP Impact Award melalui komitmen portal keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.



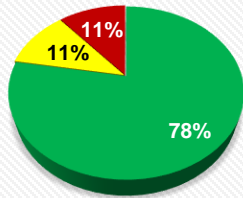
Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Semarang, dan Provinsi NTB menjadi Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 OGP Spotlight Award di kawasan Asia-Pasifik



Kabupaten Banggai memperoleh penghargaan OGP Accelerator Award melalui komitmen pengembangan aplikasi layanan kesehatan reproduksi.

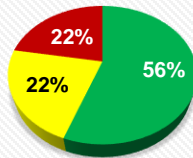
Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi RAN OGI VI Tahun 2021

Capaian Administratif Komitmen Tahun 2021



■ Baik ■ Cukup ■ Kurang

Proses Ko-Kreasi Komitmen Tahun 2021



■ Aktif ■ Semi-Aktif ■ Pasif

Temuan Monitoring dan Evaluasi :

78% (14 komitmen) dari 18 komitmen sudah memiliki **kinerja baik** selama proses implementasi di tahun 2021. Namun, hanya **56% (10 komitmen)** yang dilakukan dengan proses **kokreasi aktif**.

Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Komitmen Secara Umum:



Hambatan Koordinasi misalnya pergantian PoC di K/L dan OMS yang menghambat komunikasi pelaksana komitmen.



Keterbatasan Sumber Daya baik dari segi SDM maupun anggaran yang menjadi tantangan pelaksanaan komitmen.

2. Penguatan Implementasi OGI kedepan

Adanya Standar Kokreasi dan Partisipasi OGP Terbaru Tahun 2021



1

Multi Stakeholder Forum:

- Menyediakan ruang dialog antar pemangku kepentingan.

2

Repositori:

- Tersedianya informasi terbaru terkait kegiatan dan pencapaian aksi keterbukaan pemerintah yang mudah diakses publik.



3

Kokreasi:

- Menyediakan landasan partisipasi masyarakat.
- Ruang partisipasi masyarakat yang inklusif dalam penyusunan hingga evaluasi rencana aksi.



4

Implementasi dan Monitoring:

- Tersedianya informasi dan ruang keterlibatan bagi publik dalam implementasi dan monitoring rencana aksi.



Strategi Penguatan OGI ke Depan (1/4): Keberimbangan Anggota Dewan Pengarah

Susunan Dewan Pengarah OGI Saat Ini
Berdasarkan Kepmen PPN/Bappenas
No. KEP.88 /M.PPN/HK/06/2018

PEMERINTAH

- 1 Kementerian PPN/Bappenas
- 2 Kementerian Luar Negeri
- 3 Kantor Staf Presiden
- 4 Kementerian Dalam Negeri
- 5 Kementerian Kominfo
- 6 Kementerian PAN-RB
- 7 Komisi Informasi Pusat

CSO

INFID

Standar 1 Kokreasi dan Partisipasi OGP

“Platform Open Government menganut prinsip inklusif dan terstruktur sehingga perlu kesetaraan keterwakilan (representasi) aktor pemerintah dan masyarakat sipil”


- 1 Susunan Dewan Pengarah OGI saat ini **belum berimbang** antara perwakilan pemerintah dan non-pemerintah.
- 2 Belum adanya unsur **non-pemerintah selain OMS lainnya** seperti akademisi atau sektor swasta dalam Dewan Pengarah OGI.

Diperlukan susunan Dewan Pengarah yang berimbang agar sesuai dengan Standar Kokreasi dan Partisipasi OGP

Strategi Penguatan OGI ke Depan (2/4): Penyusunan Mekanisme Pemilihan Anggota Dewan Pengarah

Standar 1 Kokreasi dan Partisipasi OGP

“Unsur non-pemerintah dipilih melalui proses yang transparan dan adil, dipimpin oleh elemen nonpemerintah”



Belum adanya mekanisme terkait proses pemilihan perwakilan dalam Dewan Pengarah OGI

Mekanisme terkait Pemilihan Anggota Dewan Pengarah bertujuan untuk:

Memastikan keterlibatan unsur non pemerintah yang sesuai dengan arah kebijakan OGI

Menghadirkan proses kerja yang transparan dan akuntabel

Menyesuaikan dengan Standar Kokreasi dan Partisipasi terbaru dari OGP

Strategi Penguatan OGI ke Depan :

Penguatan Sekretariat Bersama dan Dasar Hukum

1

Sekretariat Bersama melakukan pemetaan isu strategis keterbukaan pemerintah, tantangan dalam implementasi Aksi OGI, untuk menjadi landasan penyusunan RAN.

2

Sekretariat Bersama melaksanakan monev, penilaian capaian dan pengumpulan data dukung K/L dan OMS.

3

Sekretariat Bersama melakukan proses pendampingan dan fasilitasi kepada K/L dan OMS dalam proses ko-kreasi Aksi OGI.



***Perumusan Arah
Kebijakan dan
Strategi
Implementasi OGI***



***Mendorong
Penetapan
Peraturan Menteri
Baru***

Diskusi arah
kebijakan
OGI

**Februari
2022**

Perumusan
Strategi dan
RAN OGI VII

**Jan-Des
2022**

Rancangan
Permen
Baru

April 2022

Permen
Baru OGI
ditetapkan

**Desember
2022**



Gedung MR21, lantai 11
Jalan Menteng Raya 21 DKI Jakarta 10340

<http://ogi.bappenas.go.id>
sekretariat.ogi@bappenas.go.id

TERIMA KASIH

